



Saingi Dominasi Waralaba Berjejaring

■ Pemkot Yogya Siapkan Lima Pilot Project Wamira

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta menetapkan 5 Warung Milik Rakyat (Wamira) sebagai proyek percontohan, dari target 14 unit yang akan direalisasikan tahun ini. Program yang digagas sebagai strategi pengendalian inflasi sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan tersebut, ditarget bisa bergulir per April mendatang.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani, menuturkan, Wamira merupakan ide Wali Kota Yogyakarta dalam merespons kondisi inflasi yang sempat tinggi pada 2025. Sebelumnya, Pemkot sudah memiliki Kios Segoro Amarto dan Warung Mrantasi di pasar, tapi jumlahnya terbatas, sehingga belum sepenuhnya terjangkau masyarakat.

"Nah, beliau (Wali Kota) menghendaki, yuk kita buat konsep baru, bagaimana Segoro Amarto ini bisa menyentuh langsung ke masyarakat. Dari diskusi panjang itu, lahirlah Wamira," tandasnya, Senin (2/3).

Dijelaskan, Wamira berstatus milik rakyat, bukan kepunyaan korporasi, dengan pengelolaan ditamakan oleh koperasi maupun kelompok masyarakat. Bahkan, Kadsdag menegaskan, lokasi Wamira bakal diatur di sudut-sudut gang atau permukiman warga, supaya benar-benar dekat dengan akar rumput.

"*Dawuh* Pak Wali memang di 45 Kelurahan. Tapi, tahun ini kita realisasikan 14 dulu. Pilot project yang akan kita *launching* sekitar lima, di beberapa kemantren, itu di bulan April," cetusnya.

Konsep Wamira dirancang agar masyarakat lebih mu-

Nah, beliau (Wali Kota) menghendaki, yuk kita buat konsep baru, bagaimana Segoro Amarto ini bisa menyentuh langsung ke masyarakat. Dari diskusi panjang itu, lahirlah Wamira.

dah, murah, dan cepat mendapatkan kebutuhan pokok, khususnya sembako, sebagai basis pengendalian inflasi. Ke depan, Disdag juga membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk agen LPG, PDAM, hingga dukungan perbankan dan kampus untuk edukasi manajemen dan digitalisasi pembayaran.

"Nanti UMKM juga bisa menjajakan dagangannya di situ. Mau agen LPG, kita bantu komunikasi dengan Pertamina. Mau air, bisa kita dekatkan dengan PDAM. Selama dibutuhkan dan harganya masuk, kenapa tidak," tambahnya.

Namun, ia menekankan, pengelola wajib menandatangani pakta integritas untuk berkomitmen menjual sesuai HET dan tidak mengambil keuntungan berlebihan. Peralnya, Wamira juga dirancang sebagai instrumen intervensi sosial bagi warga masyarakat rentan, melalui beberapa gebrakan yang kini tengah disiapkan Pemkot.

"Kalau ide Pak Wali, misalnya, memberikan voucher potongan Rp2.000 kepada warga miskin, mereka bisa beli di Wamira, itu akan sangat membantu. Lalu, CSR dari korporat juga bisa masuk ke sana," ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan, selama ini potensi ekonomi dari sektor konsumsi warga belum dikuasai secara mandiri oleh daerah. Akibatnya, perputaran uang lebih banyak mengalir ke pemilik modal besar atau kapitalis luar, khususnya retail-retail modern dengan jejaring masif.

"Kita ini sebetulnya konsumtif, beli pakaian, beli makanan. Tapi barang konsumsi itu tidak kita kuasai sendiri, masih dikuasai orang lain karena kita tidak bikin sendiri. Padahal kalau konsumsi bisa kita kuasai, 60 persen pertumbuhan ekonomi ada di tangan kita," ujarnya.

Mantan Bupati Kulon Progo dua periode tersebut menegaskan, Wamira hadir untuk menciptakan captive market atau pasar yang terjaga bagi produk lokal.

Ia pun secara gamblang menyebut, bahwa Wamira merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap dominasi waralaba berjejaring yang selama ini mengeksploitasi ekonomi warga.

"Wamira ini dalam rangka merebut pangsa pasar dari waralaba berjejaring. Kalau dikuasai mereka semua, uangnya pergi (keluar daerah). Kita hanya jadi objek eksploitasi. Maka, kita bentuk lokal jejaring sendiri, waralaba oleh rakyat melalui perusahaannya rakyat, bukan oleh kapitalis," tegasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 25 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005